



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : BIRO UMUM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WULAN SAPTO NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
3. NHK : 719116

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 750.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/45 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 168.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/72 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 273.500.000
3. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. Tanah Seluas 362 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 72.400.000
5. Tanah Seluas 357 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 71.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 152.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO GEAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.003.363**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 917.553.363



III. HUTANG

Rp. 55.900.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 861.653.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.